

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI  
HASIL DALAM PENJUALAN BATU BIJI BESI**

**(Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung  
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**YOLA KASELIA  
NPM : 1721030461**

**Progam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## ABSTRAK

Batu biji besi adalah jenis batu yang mempunyai kandungan mineral yang terdiri atas oksigen dan atom besi yang berikatan bersama dalam molekul. Kandungan tersebut merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam pembuatan logam, sehingga banyak pembisnis yang tertarik untuk membeli batu biji besi tersebut untuk dijual kembali, salah satu masyarakat Desa Gunung Langgar tertarik untuk membeli lahan batu biji besi, masyarakat yang mempunyai lahan tersebut melakukan kerjasama penjualan batu biji besi dengan sistem bagi hasil. Pihak pertama merupakan pemilik lahan pada usaha penjualan batu biji besi, dan pihak kedua yaitu selaku orang yang bertugas untuk mengelola lahan usaha dalam penjualan batu biji besi tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang terjadi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang terjadi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang terjadi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang terjadi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data, penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, sampel yang diambil 7 orang yang terdiri dari 2 orang sebagai pemilik modal (lahan) dan 5 orang sebagai penggarap lahan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis dapatkan ialah praktik kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan di awal perjanjian, serta adanya ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan pada salah satu pihak yang berakad yang terjadi di Desa Gunung

Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sistem pembagian hasil atau keuntungan tidak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan di awal perjanjian atau salah satu pihak yang berakad sudah melanggar syarat sah nya akad. Pada awal perjanjian penjualan pemilik modal dan pengelola modal telah bersepakat melakukan bagi hasil atau nisbah keuntungan yaitu bahwa setiap muatan satu truck batu biji besi pengelola modal akan diberikan persentase hasil yang adil yaitu 50%:50%, namun seiring berjalannya waktu terjadi ketidaksesuaian di mana pemilik lahan tidak menerima hasil yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi kedua belah pihak diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan bukti yang nyata, serta untuk pembagian hasil diharapkan bisa lebih adil dan transparan antara pemilik modal dan pengelola modal.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil  
Dalam Penjualan Batu Biji Besi (Studi Kasus di Desa  
Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama Mahasiswa : Yola Kaselia**

**NPM : 1721030461**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**NIP. 1958102071987031003**

**Pembimbing II**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 196806241997031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENJUALAN BATU BIJI BESI (Studi Kasus di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”**. Disusun oleh **Yola Kaselia, NPM: 1721030461, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 28 April 2021**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I.**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Khoiruddin, M.H.**  
**NPM 17210221993031002**

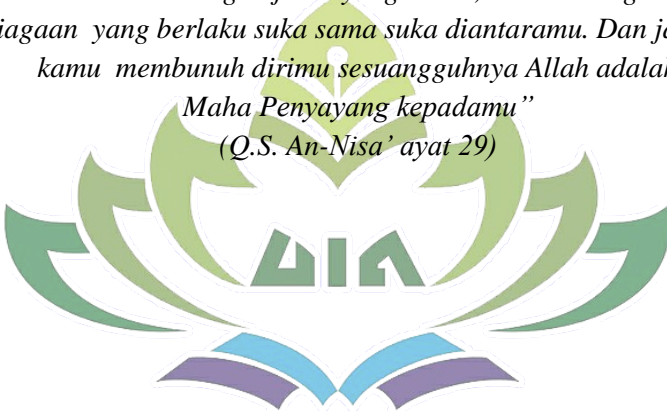
## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”  
(Q.S. An-Nisa’ ayat 29)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbi'alamin.* Rasa Syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat-Nyalah saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Aceng Rahmad (alm) dan ibu Kasmini serta kedua kakak laki-lakiku dan satu orang kakak perempuanku karena berkat kesabaran mereka, cinta, dan kasih sayang mereka, dukungan moral, spiritual, dan materi, serta senandung do'a yang ikhlas sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fakultas syari'ah yang telah mendidik, serta mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Yola Kaselia, putri ke-4 dari pasangan Bapak Aceng Rahmad (alm) dan Ibu Kasmini, yang lahir pada tanggal 03 juni 1999. Penulis memiliki dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan yang bernama Hadi Purnama, Danu Setiawan, dan Nining Yosi Oktaviana.

Penulis Memiliki Riwayat Pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai 2011.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai 2014.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2014 sampai 2017.
4. Melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah.





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENJUALAN BATU BIJI BESI”** Studi di Desa Gunung Langgar Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) jurusan Muama’lah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihaturkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Dr. H. Khairuddin, M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoirudin, M.S.I., dan sekertaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Juhrotul Khulwah, M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A., selaku pembimbing 1 dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama menempuh perkuliahan dikampus.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan Mahasiswa dan sahabat-sahabat seperjuanganku, khusus nya angkatan 2017 Muamalah B yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, dan ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 17 Maret 2021  
Penulis

**Yola Kaselia**  
**Npm: 1721030461**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Akad Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Rukun Akad .....	22
3. Syarat Akad.....	23
4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Berakad .....	24
5. Macam-macam Akad .....	26
6. Berakhirnya Akad .....	28
B. Transaksi Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) .....	29
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	41

4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> .....	45
5. Hal-Hal yang dilarang dalam <i>Mudharabah</i> .....	47
6. Hukum <i>Mudharabah</i> .....	47
7. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	52
8. Hikmah <i>Mudharabah</i> .....	53

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Singkat Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	55
1. Aspek Historis .....	55
2. Kondisi Geografis.....	57
3. Kondisi Demografis.....	57
4. Kondisi Sosial Ekonomi .....	58
5. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	60
B. Gambaran Tentang Penambangan Batu Biji Besi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	
1. Kondisi lahan.....	62
2. Struktur Organisasi.....	63
C. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	63

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji Besi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	81



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABLE

1. Table Nama-Nama Tokoh Beserta Tahun Lamanya Jabatan
2. Table Struktur Kepengurusan Desa Gunung Langgar
3. Table Jumlah Tamatan Pendidikan
4. Table Mata Pencarian Masyarakat
5. Table Sarana Pendidikan Masyarakat
6. Table Jumlah Penganut Agama Dimasyarakat
7. Table Sarana Keagamaan Dimasyarakat



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti kata dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENJUALAN BATU BIJI BESI” (Studi di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini :

Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>2</sup> Yang semuanya terkandung yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.61.

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.17.

<sup>3</sup> Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11.

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>4</sup>

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>5</sup>

Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa.<sup>6</sup>

Batu biji besi adalah jenis batu yang mempunyai kandungan mineral baik yang digunakan untuk pembuatan logam.<sup>7</sup>

Dengan penegasan judul diatas, maka maksud dari skripsi ini adalah menganalisa atau mengamati dari hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi di Desa Gunung langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

## B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini, prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa mendatang.<sup>8</sup> Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai perasaan, dan kehendak.<sup>9</sup> Eksistensi manusia yaitu sebagai makhluk sosial, sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka.<sup>10</sup> Serta kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi seutuhnya, baik dalam aspek material maupun spritual, dalam jangka pendek dan

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.48.

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.20.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.36.

<sup>7</sup> Michael Purba, *Kimia* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.81.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.27.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h.23.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h.8.



jangka panjang seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya. Bermuamalah merupakan suatu bentuk kemudahan untuk manusia yang berhubungan dengan kebutuhan kesehariannya, dan berhubungan antara manusia dan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.<sup>11</sup> Asy Syathibi melaporkan bahwa hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum diturunkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, menurutnya mustahil Tuhan menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu dan tujuan tersebut adalah untuk manusia.<sup>12</sup> Berdasarkan tujuannya dalam kegiatan bermuamalah terdapat 2 (dua) jenis akad yakni akad *Tijari* dan akad *Tabaru*. Akad *tijari* sendiri merupakan akad yang berorientasi pada profit (keuntungan). Sedangkan akad *Tabaru* adalah akad yang berorientasi pada kegiatan sosial. Akad *Tijari* mempunyai beberapa bentuk akad misalnya akad *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan lain sebagainya. Sedangkan akad *Tabaru* misalnya akad *Hawalah*, *Kafalah*, *Hibah*, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* menurut istilah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama suatu usaha. Satu pihak akan menyerahkan modal sebesar 100% yang disebut *Sahib al-mal* sedangkan pihak lainnya akan bertindak sebagai pengelola usaha yang disebut dengan *Mudarib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.<sup>14</sup> *Nisbah* yaitu presentase yang di setuju oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil keuntungan atas usaha yang dikerjasamakan. Menurut Ismail, terdapat dua cara perhitungan keuntungan bagi hasil dalam kerjasama *Mudharabah*. Yang pertama, dengan sistem *Revenue Sharing* yaitu dengan cara

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2004),h.3.

<sup>12</sup> Asy Syathibi, *Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah* (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.45,No.2,Desember 2020).

<sup>13</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001),h.13.

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengalihkan nisbah dengan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya usaha. Dan yang kedua, adalah dengan sistem *Profit Sharing* yakni dengan cara mengalihkan nisbah dengan laba atau rugi usaha.<sup>15</sup>

Salah satu yang dapat menjadi dasar hukum akad *Mudharabah* adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Qs. An-nisa : 29)

Dalam dunia perbankan sendiri, akad *Mudharabah* telah diterapkan dalam beberapa produk bank seperti Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, serta Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* dapat berupa pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.<sup>16</sup> Produk *Mudharabah* didasarkan pada Fatwa DPS BMI No.BMI-13/FAT-DPS/XI/96 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, tertanggal 27 November 1996/16 Rajab 1417H.

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam Fatwa ini adalah :

1. Sistem bagi hasil merupakan sistem kerjasama usaha bersama yang sangat sesuai dengan budaya ekonomi masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat Islam pada umumnya

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), h.83.

<sup>16</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Press, 2009), h.195.

2. *Mudharabah* merupakan kerjasama usaha yang sangat khas dalam ekonomi Islam.<sup>17</sup> Di mana akad tersebut merupakan suatu kontrak usaha berdasarkan prinsip bagi hasil antara *sahib al-mal* yang berarti seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya dengan *mudharib* yaitu pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha.<sup>18</sup>

Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad *Mudharabah* dibolehkan dalam agama islam, karena bertujuan untuk saling membantu antar sesama umat manusia. Alasan kebolehan bentuk kerjasama ini yaitu sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثُهُ  
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ  
نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن  
سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا  
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2009), h.11.

حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ  
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

*“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiga nya dan (demikianpula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran siang dan malam. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan laksanakan salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang”.*<sup>19</sup>

Menurut fakta sejarah, kerjasama dengan sistem *Mudharabah* ini pernah di praktikan oleh Nabi Muhammad SAW Pada beberapa abad silam. Hanya saja yang dipraktikan Nabi Muhammad SAW. Bukanlah dalam bentuk modal (uang cash), melainkan dalam bentuk barang. Kemudian di masa para sahabat, sistem tersebut telah diubah dalam bentuk modal (uang) dan juga

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005),h.157.



barang, hal ini sangat tergantung pada keinginan *mudarib* yang disesuaikan dengan kecenderungan pasar saat itu.<sup>20</sup>

Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu desa yang dikelilingi oleh pegunungan batu. Bebatuan yang terdapat di Desa Gunung Langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan terdapat bebatuan yang mempunyai nilai jual mulai dari. Batu yang diolah untuk menjadi batu gamping (batu kapur), batu pondasi, batu split, serta terdapat batu biji besi. Batu biji besi termasuk batu yang bernilai jual tinggi hal ini disebabkan, kandungan mineral baik yang terkandung dalam batu biji besi merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam pembuatan logam. Sehingga banyak pembisnis yang tertarik untuk membeli batu biji besi tersebut untuk dijual kembali. Banyak masyarakat desa Gunung Langgar yang membeli lahan batu biji besi tersebut untuk dijadikan sebagai lahan usaha dalam penjualan batu biji besi. Masyarakat yang mempunyai lahan tersebut melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam penjualan batu biji besi tersebut. Di mana pihak pertama merupakan pemilik lahan, dan pihak kedua yaitu selaku orang yang bertugas untuk mengelola lahan usaha dalam penjualan batu biji besi tersebut. Akad kerjasama ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan antara pemilik modal atau lahan dengan pengelola modal atau lahan

Pada awal perjanjian penjualan, telah ditentukan bahwa setiap muatan satu truk batu biji besi, pengelola modal memberikan persentase bagi rata dari penjualan batu biji besi, satu truk batu biji besi seharga Rp.500.000.- pada perjanjian yang telah ditetapkan bahwa hasil penjualan dalam muatan satu truk akan dibagi rata yaitu, pemilik lahan Rp.250.000.- dan pengelola usaha Rp.250.000.-. Seiring berjalannya waktu terjadi ketidak sesuaian di mana pemilik lahan tidak menerima hasil yang telah disepakati yaitu bawasannya setiap hasil penjualan muatan satu truk batu biji

---

<sup>20</sup> Hamid Laksono, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Tim Restu Illahi,2005),h.164.

besi akan dibagi rata, di mana pemilik lahan hanya menerima seperempat dari harga penjualan yaitu sebesar Rp.125.000.-

Hal ini menimbulkan kekecewaan pada pemilik modal (*sahib al-mal*), karena dalam konteks perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dan pengelola modal yaitu sistem bagi hasil dengan cara yang adil. Adapun maksud adil dalam sistem bagi hasil di sini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum kedua belah pihak melakukan kerjasama harus ada kejelasan berupa bagi hasil yang akan mereka peroleh.<sup>21</sup> Sebelumnya pemilik modal dan pengelola modal yang melakukan kerjasama ini sudah ada perjanjian atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Nyatanya di sini pengelola modal atau lahan (*mudarib*) melanggar perjanjian kerjasama yang sudah dibuat itu. Dengan kata lain pengelola modal atau lahan (*mudarib*) di sini sudah melakukan bentuk kerjasama yang tidak normal dan sehat dengan cara melakukan manipulasi muatan di mana seharusnya satu truk hanya memuat satu gundukan (tumpukan) tetapi pada praktiknya satu unit truk dapat menampung muatan satu sampai dua gundukan. Sehingga bagi hasil yang dilakukan dengan sistem tersebut sudah termasuk dalam *gharar*. *Gharar* dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* disini dapat berupa suatu yang mengandung unsur penipuan karena pengelola modal atau lahan (*mudarib*) sudah melakukan penipuan terhadap besar kecilnya jumlah pendapatan dari hasil penjualan batu biji besi tersebut. Penipuan tersebut akan membuat salah satu pihak merasa terzalimi yaitu pemilik modal (*sahib al-mal*). untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang berada di desa Gunung Langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penjualan Batu Biji**

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000), h.405.

## **Besi” (Studi Di Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).**

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang terjadi di desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sub-sub kajian yang diterangkan meliputi Bagaimana perjanjian itu dibuat, bagaimana dilaksanakan dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik yang ada.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi di desa Gunung Langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi di desa Gunung langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi di desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi di desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca sehingga dapat mengembangkan ilmu tentang kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi dari pemahaman secara jelas kepada kedua belah pihak yang berakad terhadap kerjasama bagi hasil dalam praktik penjualan batu biji besi di desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hukum Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*), yaitu:

1. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo (Studi Kasus di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*”. Skripsi yang ditulis oleh Merysa Tria Andriyani (2018) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:<sup>22</sup>

Kerjasama bagi hasil dalam bengkel dinamo Zayn Teknik melibatkan dua pihak yakni pemilik modal dan pengelola modal, dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak telah bersepakat menentukan nominal keuntungan yang akan didapat pemilik modal yakni sebesar 10% dari modal yang ditanamkannya, kemudian sisanya menjadi hak pengusaha. Kerjasama tersebut adalah termasuk *Mudharabah Mutlaqah*. Menurut hukum Islam, akad

---

<sup>22</sup> Merysa Tria Andriyani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.



kerjasama bagi hasil dalam bengkel dinamo Zayn Teknik tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sah akad yaitu adanya penentuan keuntungan pada awal akad perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan pada pembagian keuntungan untuk pengusaha.

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Merysa Tria Andriyani dengan yang penulis teliti yaitu persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang bagi hasil (*Mudharabah*). Adapun perbedaannya adalah aspek yang diteliti Merysa Tria Andriyani tentang bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo sedangkan aspek yang penulis teliti tentang bagi hasil dalam penjualan batu biji besi.

2. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah (Studi Kasus di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*”. Skripsi yang ditulis oleh Siti Machmudah (2013) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil Penelitiannya menyimpulkan bahwa:<sup>23</sup>

Pada awal perjanjian kerjasama ini tidak ada upah yang berupa uang, upah yang disepakati dalam perjanjian awal adalah upah berupa sebagian dari panen sehingga ada pihak yang dirugikan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak sesuai dengan tujuan dari kerjasama.

Persamaan dan perbedaan dari skripsi Siti Machmudah dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang bagi hasil (*Mudharabah*). Perbedaannya Siti Machmudah meneliti tentang sistem bagi hasil disertai dengan upah sedangkan penulis meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi.

---

<sup>23</sup> Siti Machmudah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2013.

3. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi (Studi Kasus di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*”. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Basith (2013) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:<sup>24</sup>

Praktek bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan pengertian *syirkah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha. Dan praktek bagi hasil usaha warung kopi sudah sesuai dengan bagian waktu pengelolaannya diperbolehkan karena dalam rana mu’amalah kerjasama di mana semua pihak tidak merasa ditipu maupun dirugikan dan tidak ada masalah selama semua pihak sama-sama rela dan tidak ada unsur *gharar*.

Persamaan skripsi Abdul Basith dengan yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang bagi hasil (*Mudharabah*). Perbedaan dari skripsi Abdul Basith dengan yang penulis teliti adalah Abdul Basith membahas analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi sedangkan penulis membahas tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>25</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang sesuai dengan hukum Islam (Fiqh

---

<sup>24</sup> Abdul Basith, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2013.

<sup>25</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.2-3.

Muamalah) dengan objek penelitian di desa Gunung langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian

### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>26</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi.

## 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>27</sup> Sumber data yang utama yaitu bersumber dari pemilik lahan batu biji besi di

---

<sup>26</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

<sup>27</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.27.

Desa Gunung Langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang diambil dari objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 2 orang sebagai pemilik modal atau lahan dan 5 orang sebagai penggarap lahan penjualan batu biji besi di Desa Gunung Langgar Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang terhitung 7 orang.

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai dari populasi. Sebagai contoh, yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau lebih.<sup>28</sup> Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel pada penelitian ini ditemukan berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 2 orang sebagai pemilik modal atau lahan, dan 5 orang sebagai penggarap lahan terhadap penjualan batu biji besi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.115.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan dengan pemilik modal dan pengelola modal dalam penjualan batu biji besi di desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil ditempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan dapat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara, mengatur, dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Yang berfungsi untuk mengolah data-data yang telah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.15.

dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b) *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan data.
- c) *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- d) *Sistematisasi* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>30</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti.<sup>31</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi yang tidak adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan pada salah satu pihak yang berakad. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Noer Salah dan Munaset, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.3.



## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematiskan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang teori-teori yang terkait dengan tema pada skripsi yang berisi pengertian akad, rukun dan syarat akad, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Dan konsep tentang *Mudharabah* yang berisi pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, macam-macam *Mudharabah*, hal-hal yang dilarang dalam *Mudharabah*, hukum *Mudharabah*, berakhirnya akad *Mudharabah*, dan hikmah *Mudharabah*.

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian memuat 2 hal, yang pertama yaitu gambaran umum wilayah penelitian dan yang kedua yaitu gambaran tentang praktik kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*) yang terjadi di wilayah setempat.

Pada bab keempat atau analisis penelitian menerangkan tentang analisis praktek akad kerjasama bagi hasil dalam penjualan batu biji besi di desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Di sini diuraikan beberapa aspek hukum dengan perjanjian yang ada dan kemudian dikaji dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam, khususnya mengenai *Mudharabah*.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran mengenai bukti wawancara, foto pada saat melakukan wawancara, dan surat keterangan izin riset untuk melakukan izin penelitian, dan bukti bimbingan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Akad Dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Dalam kegiatan muamalah, hal yang paling signifikan menyangkut keabsahan hukum tersebut adalah akad. Akad menentukan sah tidaknya. Signifikan akad merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua bentuk kegiatan muamalah supaya kegiatan yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab qabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.<sup>1</sup> Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Menurut Bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (الرَّبط), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

---

<sup>1</sup> A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), h. 197.

- c. Janji ( **الْعَهْدُ** ), yaitu siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat:76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.<sup>3</sup>

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan

<sup>2</sup> Ibid.,h.200.

<sup>3</sup> Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979),h.42.

seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.

4

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.<sup>5</sup> Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia di sebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya".<sup>6</sup> Sedangkan menurut Mustafa az-zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 2. Rukun Akad

### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:
  - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi.<sup>8</sup> Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baliqh atau mumayyiz dan berakal. Berakal di sini ialah tidak gila, sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
  - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.68.

- 2) *Ma'uqud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:<sup>9</sup>

- a) *Sighat al'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

### 3. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:<sup>10</sup>

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.44.



- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- d) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- e) Akad dapat memberikan faedah .
- f) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

#### **4. Hak dan Kewajiban pihak-pihak dalam Akad**

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak atau perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Al-Hurriyah (Kebebasan)**

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (Freedom Of Making Contract), baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

##### **b. Al-Musawah (Kesetaraan)**

---

<sup>11</sup> <http://aleniariiez.blogspot.co.id/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html> (9 April 2021).

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

c. Al-‘Adalah

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Qur’an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Ar-Ridha (Kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.

e. Ash-Shidq (Kejujuran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. Al-Kitabah (Tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:

- 1) Ijab dan Qabul. Ijab dan qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau

terganggunya kontrak. Ijab dan qabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.

- 2) Pelaku kontrak ('aqidain). Pelaku kontrak disyaratkan telat berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (rusyd) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
- 3) Objek akad (ma'qud 'alaih). Objek kontrak secara umum harus ada atau terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli saham, istishna', dan ijarah, karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi 'urf.
- 4) Akibat hukum kontrak (maudhu' aqd). Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

## 5. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.<sup>12</sup> Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

### a. Akad Shahih

Akad Shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikri, 1984), h.231.

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*. Suatu akad dikatakan *bathil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

c. *Aqad Munjiz*

*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

d. *Aqad Mu'alak*

*Aqad Mu'alak* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

e. *Akad Mudhaf*

*Akad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

## 6. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:<sup>13</sup>

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu
- e. Pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

---

<sup>13</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 70.

## B. Transaksi Bagi Hasil (*Mudharabah*)

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفعة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pelaku yang menjalankan usaha atau yang biasa disebut pengusaha (*mudharib*).<sup>14</sup> Kata *darb* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

*Mudharabah* secara bahasa juga diambil dari kata قرض yang memiliki arti القرض (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha, *Mudharabah* juga terambil dari kata لمرقة رضى yang berarti persamaan. Maksudnya adalah adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.<sup>15</sup>

Sedangkan Ascarya menjelaskan bahwa *Mudharabah* atau penanaman modal secara istilah adalah penyertaan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal) yang biasa disebut *sahib al-mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola usaha yang dalam Islam disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang di hasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Hukum Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.150.

<sup>15</sup> *Ibid.*



(yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).<sup>16</sup> *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *Mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Dalam praktik *Mudharabah* antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*sahib al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Sistem pembiayaan *Mudharabah* kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai *sahib al-mal* dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh *mudharib* sesuai dengan rukun dan syarat.

*Mudharabah* dalam Islam ialah perjanjian keuntungan dan kerugian. Dalam perjanjian *Mudharabah*, modal diberikan oleh satu pihak dan yang menjalankan modal adalah pihak lain, atas dasar perjanjian berdasarkan pada kesepakatan bersama. Hanya saja disyaratkan bahwa semua perjanjian itu harus ditulis sehingga masing-masing pihak dapat mengacu pada perjanjiannya. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman di antara mereka yang berjanji.<sup>17</sup> Dalam agama Islam, kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha tidak dilarang, tetapi perintah tentang hal itu secara tekstual dan kontekstual relative banyak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>18</sup> Salah satu ayat yang

---

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),h.60.

<sup>17</sup> *Ibid.*,h.96.

<sup>18</sup> Hamid Laksono, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Illahi,2005),h.167.

sering dijadikan dasar terhadap kebolehan itu, adalah Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا أَهْلَ هَدْيٍ وَلَا الْفَلَاحِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabilan kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepa Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>19</sup>

Makna ayat tersebut berimplikasi pada segala bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan mereka yang mempunyai keahlian dalam menjalankan modalnya, yang berorientasi pada kebaikan, bukan pada kerusakan. Karena itu, kerja sama ini haruslah dilandasi dengan suatu perencanaan usaha yang baik, yang menurut istilah sekarang adalah manajemen yang berorientasi pada peningkatan usaha secara optimal.

Contoh akad *Mudharabah* misalnya, Rizki merencanakan berdagang buah. Untuk memulai usaha tersebut Rizki meminjam uang kepada bank sebanyak Rp. 100.000.- dengan menggunakan akad perjanjian bagi hasil, yaitu Rizki akan memperoleh bagian keuntungan sebanyak 70% dan bank akan mendapat hasil keuntungan 30% dengan masa pengambilan pinjaman sebulan. Setelah persetujuan kedua belah pihak di tandatangani, maka Rizki akan diberi pinjaman uang tunai sejumlah Rp. 100.000.-. Pada hari pertama, Rizki memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 10.000.-. Rizki mencatat keuntungan bersih sebanyak Rp. 10.000.- Rizki mencatat keuntungan tersebut pada buku catatan khusus yang nantinya akan dilaporkan pada bank sebagai bentuk pelaporan hasil usaha. Pada minggu pertama, Rizki telah mengumpulkan keuntungan bersih sebanyak Rp. 60.000.-. Setiap minggu Rizki menyetor uangnya pada bank melalui tabungan *wadi'ah*. Pada akhir bulan keuntungan bersih yang diperoleh si Rizki sebanyak Rp. 172.000.-. Pada bulan kedua, si Rizki tidak meminjam uang bank untuk modal usaha selanjutnya, karena Rizki sudah mendapatkan hasil keuntungan sebanyak Rp. 168.000.-

Muhammad Abdul sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syafe'i Antonio menyatakan bahwa, tidak

---

<sup>19</sup> Nurul Fiqri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Syamil Al-Qur'an, 2007),h.52.

dilarang apabila seorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan menetapkan bagian keuntungan pemilik modal usaha, berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Atas dasar pertimbangan maslahat, maka yang demikian itu tidak mengandung sesuatu dosa atau kesalahan. Selain itu kersama semacam ini bermanfaat bagi keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri. Kegiatan usaha yang berbentuk *Mudharabah* ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yakni terciptanya kerjasama dan tolong-menolong dalam usaha perdagangan.<sup>20</sup>

Secara teori *Mudharabah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan penekanan yang variatif, namun secara umum mereka menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dalam jumlah, jenis dan kesepakatan tertentu dari pemilik modal kepada pengelola usaha untuk digunakan sebagai sebuah usaha ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka keuntungan tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan jika usaha tidak berhasil maka kerugian juga ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya pula.<sup>21</sup>

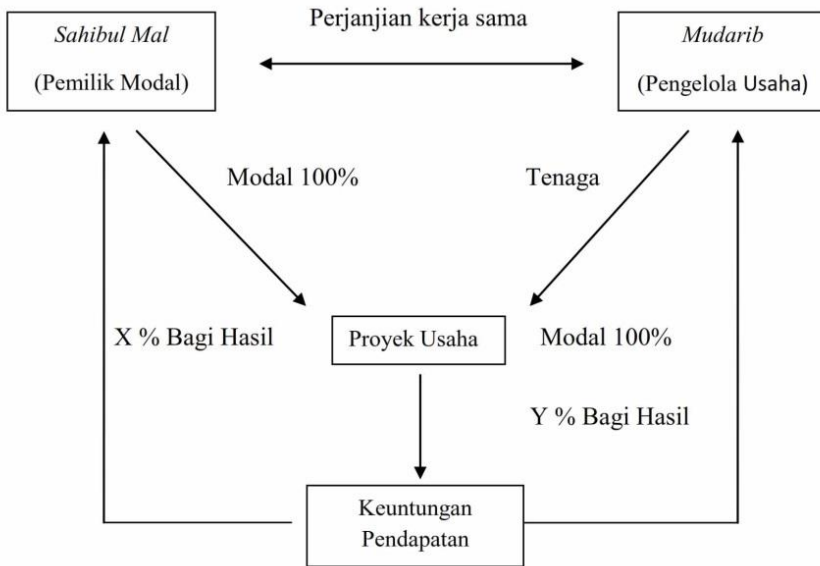
---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h.95.

<sup>21</sup> Darsono, Ali Sakti, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2017),h.213.

Berikut ini merupakan bentuk skema akad *Mudharabah*:

Perjanjian kerja sama



Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mudarib* dan *Sahib al-mal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *Sahib al-mal* dan *Mudarib*.
- Sahib al-mal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh pemilik modal (*sahib al-mal*).
- Mudarib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha rill.
- Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah diperjanjikan.<sup>22</sup>
- Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *sahib al-mal* akan dikembalikan semuanya

<sup>22</sup> *Ibid.*

(100%) oleh *mudharib* kepada *sahib al-mal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Jadi, akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Namun, selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang ahli mengolah uang. Berikut adalah dasar hukum berupa makna ayat Al-Qur'an, Hadis, Ijma para ulama, dan Qiyas yang menguatkan diperbolehkannya akad *Mudharabah*:

### a. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur'an

Surat An-nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama

<sup>23</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.116.



*suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu''.*

Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
هَيْمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

''Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki''.

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ  
مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أَوْثَمَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu percayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertawakal kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

## **b. Dasar Hukum Mudharabah Berdasarkan Hadis**

Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَلَاثَ فَيَهْنَ الْبَرَكَهَةِ الْبَيْعِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن)

*“Dari Sholih Ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggihkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).”*

Kualitas hadis di atas bernilai sahih, sampai pada Rasulullah SAW (*marfu*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).<sup>24</sup> Dari hadis di atas dapat di pahami bahwasanya *Mudharabah* adalah salah satu solusi umat Islam untuk menjauhkan diri dari riba.

<sup>24</sup> Suqiah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 142.

*Mudharabah* merupakan kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama disebut *sahib al-mal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>25</sup>

Hadis Riwayat Malik Ibnu Annas

وَحَدَّثَنَا مَا لِكَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفْلَانَ أَعْطَاهُ مَا لَا قِرَاطًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّبَّ بَحَّ بَيْنَهُمَا (رواه ما لك ابن انس)

“Dan malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari ‘A’la bin (putera) Abdurrahman (bersumber) dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Usman bin Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya”. (HR. Malik Ibnu Annas)

Kualitas hadis ini bernilai sahih, tetapi tidak sampai pada Rasulullah SAW (marfu’) dan sanadnya bersambung (muttasil) karena isinya tidak menyimpang dari prinsip mu’amalah.<sup>26</sup>

Kerjasama *Mudharabah* ini sudah ada sejak zaman nabi. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keafsahan *Mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historinya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan *mu’amalah* Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Seperti diriwayatkan oleh

<sup>25</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 141.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Ibnu Abbas al-Abbas telah mempraktikkan *Mudharabah* ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakan dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika ia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya.<sup>27</sup> Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun menyetujuinya. Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecerobohan salah satu pihak, maka yang harus menanggung kerugiannya adalah dirinya sendiri, tetapi kalau kerugian itu karena kecelakaan atau unsur ketidaksengajaan maka kerugian ditanggung bersama.<sup>28</sup>

### 1) Hadis Riwayat Abu Dawud

عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أَوْ ضَحِيَّةً أَوْ شَاةً فَأَشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَاتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِبُرْكَاةٍ فِي بَيْعِهِ كَمَا نَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ (رواه أبو داود)

“ Hadis bersumber dari Urwah, yakni Ibnu Abi al-Ja’d al- Bariqiy, ia berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan satu dinar untuk membeli hewan qurban atau seekor sapi, maka ia membeli dua ekor sapi, maka ia jual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia membawa seekor sapi dan satu dinar kepada Nabi SAW, maka beliau mendoakannya keberkahan bisnisnya, andai ia membeli pasir maka ia akan mendapatkan keuntungan”.

<sup>27</sup> *Ibid.*,h.142.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kualitas hadis ini dinyatakan sah, sampai pada Rasulullah SAW (*marfu*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*), karena isinya tidak menyimpang dari prinsip muamalah.

**c. Dasar Hukum *Mudharabah* Berdasarkan *Ijma'***

Di antara *Ijma'* dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>29</sup> Para ulama sepakat atas diperbolehkannya melakukan *Qirad*, pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba dalam bentuk dinar dan dirham. Mereka juga bersepakat bahwa pengelola usaha boleh memberi syarat perolehan sepertiga atau separuh dari laba, atau jumlah yang telah disepakati mereka berdua, setelah sebelumnya segala sesuatunya sudah menjadi jelas. Bentuk kerjasama ini sudah pernah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW.<sup>30</sup>

Menurut pendapat Mohammad Nejatullah Shiddiqi sebagaimana dikutip dalam Nur Chamid, keberhasilan terletak dalam kebaikan. Kebaikan dalam Islam, berarti bersifat positif terhadap kehidupan dan orang lain. Karena itu Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material, namun Islam menyuruh masyarakat untuk menjamin pemilikan tersebut bagi setiap individu dalam segala suasana. Namun terdapat pembatasan terhadap sesuatu. Oleh karena itu sebaiknya manusia bertindak tidak berlebihan.<sup>31</sup>

Abdul Basith Junaidy menyatakan bahwa dalam kegiatan bermuamalah, terdapat asas Ibadah (*Mabda' al-*

---

<sup>29</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dhana Bakti Prima Yassa, 1996), h.304.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

*ibadah*). Asas ibadah adalah asas umum hukum bisnis Islam (bermuamalah) secara umum. Asas ini berbunyi “ Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”’.<sup>32</sup> Segala sesuatu adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada dalil tegas yang melarang perbuatan tersebut. Hal itu berarti hukum dasar muamalah ialah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum dalam bidang hukum bisnis Islam, khususnya hukum perjanjian kerjasama, maka setiap tindakan hukum dan perjanjian apa pun yang disebut selama tidak ada larangan khusus terhadap perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>33</sup> Jika dikaitkan dengan asas diatas, maka akad *mudharabah* sah dilakukan. Serta *mudharabah* juga merupakan akad yang mengarah pada tujuan positif yakni untuk membantu sesama muslim.<sup>34</sup>

#### **d. Dasar Hukum Mudharabah Berdasarkan Qiyas**

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Di antara umat manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### **3. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Unsur-unsur akad *Mudharabah* yang harus ada di dalamnya dan menjadi syarat sahnya transaksi *Mudharabah* itu, adalah:<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),h.42.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*,h.44.

a. Adanya *sighat* (Ijab Qabul)

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
- 2) *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui dan disetujui oleh pihak kedua. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.
- 3) *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai, maksudnya pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.
- 4) Adanya 'aqidani (pihak penyedia dana dan pengelola dana).<sup>36</sup>

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu:

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya, *sahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.<sup>37</sup>
- 2) Pemodal memberi hak mutlak kepada pengelola untuk mengelola usaha atau menentukan kebijakan yang harus diputuskan menurut kebiasaan yang berlaku.<sup>38</sup>
- 3) Memiliki kewenangan atau memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola modal

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),h.5.

<sup>38</sup> Syaikh Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Kemang: Fathan Media Prima,2000),h.275.



merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

- 4) *Mudarib* pada dasarnya ialah orang yang mendapatkan amanah dari *sahib al-mal*. Tanggung jawab mempunyai arti kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin.<sup>39</sup>
- 5) *Mudarib* tidak diperbolehkan mengadakan *Mudarabah* dengan pemodal yang baru, jika ia telah melakukannya dengan pemilik modal yang pertama, kecuali atas seizinnya, karena haram membuat mudarat di antara kaum Muslimin.<sup>40</sup>

b. Adanya *ma'qud alayh* (modal)

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *Mudharabah* sehingga tidak menimbulkan dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.
- 3) Modal harus tunai bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.

---

<sup>39</sup>Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.190.

<sup>40</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Madinah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 2017), h.673.

- 5) Dibedakan dengan jelas antara modal dengan hasil yang akan dihasilkan dengan kesepakatan.<sup>41</sup>

c. Adanya *al-a'mal* (usaha)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan dan industri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang dibolehkan adalah semua jenis usaha dan tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.<sup>42</sup>

d. Adanya *al-ribhu* (keuntungan)

Mengenai keuntungan diisyaratkan bahwa:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan harus dilakukan secara cermat.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti *sahib al-mal* telah mematok untuk tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- 3) Keuntungan harus jelas seperti bagian setengah, sepertiga, seperempat, sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.
- 4) Nisbah pembagian dapat juga ditentukan dengan presentase, misalnya 60%:40%, 50%:50% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus terikat

---

<sup>41</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 162.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 63.

pada bilangan tertentu. Artinya, jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan.

- 5) Keuntungan tidak dibagikan selama akad berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membaginya.

#### 4. Macam- Macam *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *sahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *sahib al-mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan jenis *Mudharabah* dimana pemilik usaha (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan usaha oleh pemilik modal (*sahib al-mal*).<sup>43</sup> Dalam akad *Mudharabah Mutlaqah* pengelola usaha diberi keluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal.

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* yaitu kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum di *sahib al-mal* dalam memasuki dunia usaha. Dalam *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik modal (*sahib al-mal*) telah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh

---

<sup>43</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), h.57.

pengelola usaha. Oleh karena itu, pengelola usaha harus menjalankan usaha sesuai dengan syarat-syarat dan batasan yang telah ditentukan oleh pemilik modal seperti jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha.<sup>44</sup>

**c. *Mudharabah Musytarakah***

*Mudharabah Musytarakah* yaitu jenis *Mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini yaitu perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Dalam dunia perbankan syariah, *Mudharabah Muqayyadah* dibagi menjadi dua yakni:

**1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet***

*Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* yaitu di mana *mudharib* ikut menanggung resiko jika terjadi kerugian atas usaha. Dalam akad ini, *sahib al-mal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya dan sektor usahanya. Misalnya, nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* sebesar Rp. 2.000.000,- untuk proyek pembangunan jalan tol, dalam jangka waktu 10 tahun. Maka batasan yang diberikan oleh nasabah (*sahib al-mal*) yaitu terkait dengan proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syariah akan melakukan investasi atas dana Rp. 2.000.000,- khusus untuk investasi proyek jalan tol dalam jangka waktu

---

<sup>44</sup>Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.138.

tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh *sahib al-mal* berasal dari pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi *Mudharabah Mutlaqah*.<sup>45</sup>

## 2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

*Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* yaitu dimana pihak *sahib al-mal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib* nya telah ditetapkan oleh *sahib al-mal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *sahib al-mal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan di bagi antara *sahib al-mal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah sebagai agen yang mempertemukan keduanya dan akan mendapatkan fee.

## 5. Hal-hal yang dilarang dalam *Mudharabah*

Hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan *mudharabah* yaitu;

- a. membelanjakan modal untuk kepentingan sendiri.
- b. Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* (*Qiradh*) tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- c. Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>46</sup>

## 6. Hukum *Mudharabah*

Hukum *Mudharabah* terbagi dua, yaitu *Mudharabah Fasid* dan *Mudharabah Sahih*. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai *Mudharabah Fasid* dan *Mudharabah Sahih*.<sup>47</sup>

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.156.

<sup>47</sup>*Ibid.*

a. Hukum *Mudharabah Fasid*

Salah satu contoh *Mudharabah Fasid* adalah mengatakan, ‘‘ Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita’’. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan tersebut termasuk tidak dapat dikatakan *Mudharabah* yang *sahih* karena pengusaha (pemburu) berhak mendapat upah atas pekerjaannya, baik ia mendapat buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*. Tentu saja, kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal hilang atau rusak, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya bahwa modal tersebut benar-benar hilang atau rusak.<sup>48</sup>

Beberapa hal lain dalam *Mudharabah Fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.
- 2) pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.

b. Hukum *Mudharabah Sahih*

Hukum *Mudharabah sahih* yang tergolong sahih cukup banyak, diantaranya berikut ini:<sup>50</sup>

a) Tanggung jawab Pengusaha

Ulama Fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*, h.157.

<sup>50</sup>*Ibid.*

tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini dikarenakan kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *Mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja.<sup>51</sup> Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.

b) Tasharruf Pengusaha

1) Pada *Mudharabah Mutlaqah*

2) Menurut ulama Hanafiyah, jika *Mudharabah Mutlaqah* maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:<sup>52</sup>

- (a) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- (b) Menurut Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*



- (c) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *Mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

c) Pada *Mudharabah Muqayyadah*

Secara umum, hukum *Mudharabah Muqayyadah* sama dengan ketentuan yang ada pada *Mudharabah Mutlaqah*. Namun, terdapat beberapa pengecualian, diantaranya:<sup>53</sup>

(1) Penentuan tempat

Jika pemilik modal (*sahibul mal*) menentukan tempat, seperti contoh ucapan, “Gunakanlah modal ini untuk *Mudharabah*, dengan syarat harus di daerah Lampung.” Maka pengusaha harus mengusahakannya di daerah Lampung, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan.

(2) Penentuan orang

(3) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah.

(4) Penentuan laba

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan jangka waktu sehingga jika melewati batas, maka akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*,h.158.

<sup>54</sup>*Ibid.*

d) Hak-Hak Pengusaha (*mudarib*)

Pengusaha mempunyai dua hak atas harta *Mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak mendapatkan laba, yang telah ditentukan dalam akad.<sup>55</sup>

e) Hak Nafkah (membelanjakan)

Imam Syafe'i berpendapat bahwa, pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, maka akadnya menjadi rusak.

f) Hak Mendapatkan Laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendirinya. Dalam pembagian laba, disyaratkan setelah modal diambil sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ التَّاجِرِ لَا يُسَلِّمُ رَجُلٌ حَتَّى يُسَلِّمَ رَأْسَ مَالِهِ.

“Perumpamaan orang muslim seperti pedagang, tidak menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya.”

Berdasarkan hadis di atas, para ahli fiqh sepakat bahwa sebelum laba diberikan, pengusaha diharuskan menyerahkan dahulu modal kepada pemiliknya.

g) Hak Pemilik Modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba serta modal yang telah

---

<sup>55</sup>*Ibid.*,h.159.

ditanamkan. Jika tidak ada laba, pemilik modal tidak akan mendapat apa-apa.<sup>56</sup>

## 7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Mudharabah* dinyatakan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *Mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *Mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudarib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
- b. Pemilik modal menarik modalnya
- c. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *Mudharabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *Mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka, akad *Mudharabah* boleh diwariskan.
- d. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- e. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanafiah, akad *Mudharabah* batal.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h.160.

<sup>57</sup>*Ibid.*

- f. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh manaj (*manager*) oleh pekerja.

## 8. Hikmah *Mudharabah*

Agama Islam telah menetapkan *Mudharabah* sebagai satu bentuk mu'amalah (ajaran) yang diperbolehkan untuk memudahkan bagi manusia dalam melakukan usaha mencari karunia Allah. Sebab, adakalanya sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sebagian yang lain adakalanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta tetapi tidak memiliki modal. Di sini Islam memperbolehkan *Mudharabah* supaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian *mudharib* dalam mengembangkan hartanya dan *mudharib* dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkan.

Adapun hikmah *Mudharabah* yang dikehendaki Allah SWT yaitu dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama, terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal, dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal, terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal, membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2009.

A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.

Abdullah Al-Mushih, et.al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Darsono, et.al, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Hamid Laksono, et.al, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Tim Restu Illahi, 2005.

Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2011.

Imam Mustofa, *Hukum Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Michael Purba, *Kimia*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1997.

M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nurul Fiqri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Syamil Al-Qur'an, 2007.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007.

Sohari Sahari dan Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.



Syaikh Mustafa Dieb Al- Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Kemang: Fathan Media Prima, 2000.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Mualimin, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Madinah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.

Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

#### **Jurnal**

Asy Syathibi, Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. 2, Desember 2020.

#### **Internet**

<http://aleniariez.blogspot.co.id/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html> (9 April 2021).

#### **Skripsi**

Abdul Basith "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo".

Merysa Tria Andriyani "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik".

Siti Machmudah "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo".

## **Wawancara**

Sepri, wawancara dengan penulis, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 7 Desember 2020.

Damin, wawancara dengan penulis, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 8 Desember 2020.

Siti, wawancara dengan penulis, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 9 Desember 2020.

Kamti, wawancara langsung dengan istri pemilik modal, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 11 Desember 2020.

Agus Tomi, wawancara langsung dengan pemilik modal, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 16 Desember 2020.

Rudi, wawancara langsung dengan pengelola usaha, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 22 Desember 2020.

Kadir, wawancara dengan penulis, Desa Gunung Langgar Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, 23 Desember 2020.